



Filantropi Buddhis dan Solidaritas Sosial di Kota Kisaran: Kajian Sosiologis

Candra

Vihara Maitreya Jaya Kisaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: pakchand.vg@gmail.com

Abstract. *This study aims to explore the phenomenon of fundraising conducted in the name of Buddhism and humanity in Kisaran City, North Sumatra, using a qualitative approach. Data was collected through direct observation, in-depth interviews with the participants, and document analysis related to the fundraising activities that had been conducted. The research findings show that fundraising is carried out in various forms, such as food donations, social activities, and online donations. All of these activities are rooted in Buddhist values, particularly dana (giving) and karuna (compassion). The use of digital technology, especially online donation platforms, has increased community participation and transparency in the fundraising process. However, the study also identified challenges such as the lack of accountability in managing the funds and the risk of misuse that could undermine public trust. In this context, transparency and active community involvement are essential to building trust and ensuring the effectiveness of religious philanthropy. The study concludes that the sustainability of Buddhist fundraising practices in modern society can be achieved by combining spiritual integrity, good governance, and appropriate technology adaptation. Through this holistic approach, Buddhism-based fundraising can remain relevant and effective in supporting humanitarian activities in the digital age.*

Keywords: *Buddhism; Digital Technology; Fundraising; Humanity; Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena penggalangan dana yang dilakukan atas nama agama Buddha dan kemanusiaan di Kota Kisaran, Sumatera Utara, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan para pelaku, serta analisis dokumentasi terkait kegiatan penggalangan dana yang telah dilakukan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggalangan dana dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengumpulan dana untuk makanan, kegiatan sosial, dan donasi daring. Semua bentuk kegiatan ini berakar pada nilai-nilai Buddhis, terutama dana (memberi) dan karuna (kasih sayang). Penggunaan teknologi digital, khususnya platform donasi daring, telah meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses penggalangan dana. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan seperti kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan risiko penyalahgunaan yang dapat merusak kepercayaan publik. Dalam konteks ini, transparansi dan keterlibatan aktif komunitas sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan efektivitas filantropi keagamaan. Studi ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan praktik penggalangan dana Buddhis dalam masyarakat modern dapat tercapai dengan menggabungkan integritas spiritual, tata kelola yang baik, dan adaptasi teknologi yang tepat. Melalui pendekatan yang holistik ini, penggalangan dana berbasis agama Buddha dapat tetap relevan dan efektif dalam mendukung kegiatan kemanusiaan di era digital.

Kata kunci: Agama Buddha; Kemanusiaan; Penggalangan Dana; Teknologi Digital; Transparansi

1. LATAR BELAKANG

Fenomena penggalangan dana atas nama Buddhisme dan kemanusiaan telah menjadi salah satu bentuk nyata dari aktualisasi ajaran moral dalam praktik sosial umat Buddha di Indonesia. Di kota Kisaran, Provinsi Sumatera Utara, praktik ini bukan hanya mencerminkan semangat berdana (*dāna*) dan welas asih (*karuṇā*), tetapi juga menjadi refleksi dari meningkatnya partisipasi umat dalam kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan yang berbasis komunitas. Buddhisme mendorong praktik kedermawanan sebagai jalan untuk mengembangkan kebijaksanaan (*prajñā*) dan menumbuhkan solidaritas antarumat manusia

(Shen, 2018). Hal ini tampak dalam berbagai bentuk kegiatan mulai dari penyediaan makanan vegetarian, sumbangan tunai, hingga bazar amal yang bersifat kolektif dan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat majemuk, kegiatan filantropi keagamaan seperti penggalangan dana memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kohesi sosial. Dana tidak hanya berfungsi sebagai simbol kemurahan hati individual, tetapi juga memperkuat identitas kolektif dan jaringan sosial dalam komunitas Buddhis (Burmansah et al., 2025; Herzog, 2020). Selain itu, kegiatan semacam ini mendorong terbangunnya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang agama atau etnis, sebagaimana tercermin dalam bantuan sosial pascabencana atau kegiatan solidaritas lintas agama. Pengalaman kota Kisaran menunjukkan bagaimana kegiatan penggalangan dana dapat menjelma menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar umat Buddha maupun dengan masyarakat luas.

Namun demikian, dinamika di lapangan memperlihatkan adanya variasi dalam pelaksanaan praktik penggalangan dana. Sementara sebagian besar kegiatan dijalankan secara transparan dan akuntabel oleh lembaga formal seperti vihara dan majelis Buddhis, sebagian lainnya dilakukan oleh individu atau kelompok informal yang tidak selalu memiliki sistem akuntabilitas yang memadai. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan dana serta penurunan kepercayaan publik terhadap organisasi keagamaan (Osuna, 2025). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis fenomena ini secara sosiologis guna memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi praktik tersebut, baik dari segi motivasi individu, struktur organisasi, hingga persepsi masyarakat terhadap legitimasi lembaga keagamaan.

Dalam pandangan Esser (2005), tindakan sosial seperti berdana dapat dipahami melalui empat kategori: rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional. Konsep ini menjadi kerangka penting untuk mengeksplorasi motif donatur dalam kegiatan penggalangan dana Buddhis. Sebagian donatur mungkin memberi karena nilai-nilai keyakinan mereka terhadap ajaran Buddha (*wertrational*), sementara yang lain terdorong oleh emosi atau tradisi komunitas. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian ini berupaya membedah secara mendalam dimensi sosial dari praktik berdana sebagai bagian integral dari dinamika keberagamaan umat Buddha di Kisaran.

Pada sisi lain, teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Homans dan Blau turut menjelaskan bagaimana interaksi antara penggalang dana dan donatur merupakan bagian dari pertukaran simbolik dan material. Donatur memperoleh keuntungan berupa ketenangan batin, reputasi sosial, atau pahala spiritual, sedangkan penggalang dana memperoleh legitimasi dan dukungan moral dari komunitasnya (Diez, 2018). Pemahaman ini diperlukan agar kegiatan

penggalangan dana tidak semata dilihat sebagai praktik ekonomi, tetapi juga sebagai interaksi sosial yang kompleks dengan muatan nilai dan makna religius.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggalangan dana di Kota Kisaran dalam bingkai ajaran Buddhisme dan perspektif sosiologi. Penelitian ini penting untuk mendukung peningkatan akuntabilitas, pemahaman umat terhadap nilai-nilai berdana, dan penguatan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai agama. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik filantropi keagamaan yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian pustaka ini mengulas kerangka teori sosiologis yang relevan dalam menganalisis praktik penggalangan dana keagamaan, khususnya dalam konteks komunitas Buddhis di Kota Kisaran. Berbagai pendekatan teori klasik dan kontemporer digunakan untuk menelaah motivasi individual, struktur sosial, serta dinamika komunitas dalam praktik kedermawanan yang berlandaskan ajaran agama.

Teori Pertukaran Sosial dan Tindakan Sosial

Salah satu pendekatan awal yang dapat digunakan untuk memahami fenomena penggalangan dana dalam komunitas keagamaan adalah Teori Tindakan Sosial. Teori ini memandang tindakan manusia tidak semata-mata sebagai respons terhadap rangsangan eksternal, melainkan sebagai aktivitas yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dalam suatu konteks sosial (Holzkamp, 1992). Dalam konteks ini, tindakan berdana atau memberikan sumbangan dipengaruhi oleh motivasi personal yang beragam, seperti altruisme, kewajiban sosial, atau panggilan keagamaan (Barman, 2017). Meskipun tidak terdapat rujukan eksplisit yang mendukung elemen ini dalam lampiran, pendekatan ini memberikan kerangka konseptual yang penting dalam membedah tindakan amal berbasis agama.

Sementara itu, Teori Pertukaran Sosial menyoroti relasi antara penggalang dana dan donatur sebagai bentuk pertukaran simbolik. Donatur tidak hanya memberi karena dorongan moral, tetapi juga dengan harapan memperoleh kepuasan pribadi, pengakuan sosial, atau bahkan pahala spiritual (James et al., 2021; Varey, 2015). Teori ini menekankan adanya keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan dalam hubungan sosial, sekaligus memperlihatkan dinamika kuasa dan legitimasi antara institusi keagamaan dan umatnya.

Tipologi Tindakan Sosial Max Weber dalam Konteks Dana Keagamaan

Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial menjadi empat kategori: tindakan rasional-instrumental, tindakan rasional-nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Dalam praktik penggalangan dana, keempat kategori ini dapat digunakan untuk memahami keragaman motivasi umat Buddha dalam berdonasi.

Tindakan rasional-nilai (*wertrational*) adalah bentuk tindakan yang dijalankan berdasarkan keyakinan terhadap seperangkat nilai, termasuk ajaran keagamaan tentang pentingnya berdana dan membantu sesama. Dalam konteks ini, motivasi berdonasi bukan semata-mata demi imbalan, melainkan sebagai komitmen terhadap prinsip moral dan religius (Umarji et al., 2025).

Tindakan afektif merujuk pada tindakan yang dilandasi oleh emosi, seperti empati terhadap penderitaan orang lain atau rasa syukur atas berkah yang diterima. Dalam penggalangan dana keagamaan, hal ini kerap muncul saat umat tersentuh oleh cerita penderitaan yang disampaikan dalam kampanye donasi.

Adapun tindakan tradisional merujuk pada praktik berdana yang dilakukan karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun dalam komunitas, misalnya pemberian rutin pada hari-hari suci agama atau mengikuti tradisi keluarga dalam berdana ke vihara. Tipologi ini membantu menjelaskan bahwa donasi keagamaan bukanlah tindakan tunggal dengan satu motivasi, melainkan kompleks dan multi-dimensi.

Teori Modal Sosial dan Jaringan Komunitas Keagamaan

Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep *modal sosial* sebagai akumulasi sumber daya yang diperoleh melalui jaringan hubungan sosial. Dalam konteks komunitas keagamaan, modal sosial muncul dari ikatan normatif, nilai bersama, serta aktivitas kolektif yang memperkuat rasa percaya dan kerja sama.

Studi oleh Brehm & Rahn (1997) menunjukkan bahwa modal sosial memainkan peran krusial dalam memperkuat partisipasi warga dalam kegiatan kolektif, termasuk dalam penggalangan dana keagamaan. Hal ini diperkuat oleh Liu & Besser (2003) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan keterlibatan dalam komunitas saling berkaitan dan menjadi pilar penting dalam pelaksanaan aksi sosial.

Dalam praktiknya, jaringan sosial dalam komunitas Buddhis baik formal seperti organisasi vihara maupun informal seperti kelompok relawan menjadi infrastruktur sosial yang memudahkan mobilisasi sumber daya, distribusi informasi, dan penggalangan partisipasi umat dalam kegiatan filantropis.

Solidaritas Sosial dalam Perspektif Durkheim

Emile Durkheim memperkenalkan konsep solidaritas sosial sebagai fondasi stabilitas sosial. Ia membedakan antara solidaritas mekanik yang muncul dari kesamaan nilai dan kepercayaan, serta solidaritas organik yang berdasarkan pembagian kerja dan saling ketergantungan dalam masyarakat kompleks.

Dalam konteks kegiatan keagamaan, terutama ritual kolektif seperti doa bersama atau acara penggalangan dana, Durkheim melihatnya sebagai bentuk penguatan solidaritas mekanik di mana komunitas dipersatukan oleh nilai-nilai bersama dan tujuan moral kolektif (Achmad et al., 2022).

Realo et al. (2008) menambahkan bahwa partisipasi dalam aktivitas sosial keagamaan dapat meningkatkan rasa memiliki, memperkuat identitas kolektif, dan menciptakan ketahanan sosial dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu, praktik penggalangan dana dalam komunitas Buddhis bukan sekadar aktivitas ekonomi atau ritual keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam membangun integrasi sosial dan memperkuat modal sosial komunitas.

Dengan demikian, melalui berbagai kerangka teoritis ini, praktik penggalangan dana dapat dianalisis secara lebih menyeluruh baik dari sisi motivasi individual, mekanisme sosial, hingga dampaknya terhadap struktur komunitas dan solidaritas sosial secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma sosiologis, yang bertujuan untuk memahami fenomena penggalangan dana atas nama Buddhisme dan kemanusiaan di Kota Kisaran secara mendalam. Fokus utama metode ini adalah pada makna subjektif, struktur sosial, dan praktik sosial yang dijalankan dalam komunitas Buddhis melalui proses observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi.

Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus kualitatif, mengingat kompleksitas dan keunikan konteks lokal di mana praktik penggalangan dana berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap tindakan sosial umat Buddha, baik secara individu maupun kolektif. Mengacu pada Teori Tindakan Sosial Eyigunlu (2023), tindakan penggalangan dana dianalisis sebagai ekspresi keyakinan dan norma sosial yang hidup dalam komunitas, bukan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data

Tiga teknik utama digunakan dalam pengumpulan data: observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pertama, observasi langsung dilakukan terhadap praktik penggalangan dana yang berlangsung di vihara, rumah makan umat, serta lokasi kegiatan sosial lainnya. Fokus pengamatan diarahkan pada interaksi antara penggalang dana dan donatur, mekanisme pelaksanaan, hingga simbol-simbol religius yang digunakan dalam kampanye dana.

Kedua, wawancara mendalam dilakukan terhadap tiga kelompok utama: (1) tokoh agama Buddha seperti Romo Pandita dan Pandita Madya, yang memahami doktrin dana dan karena; (2) pengurus organisasi keagamaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana; dan (3) umat Buddha sebagai donatur yang merepresentasikan keragaman motivasi dan pemahaman atas kegiatan tersebut. Pertanyaan wawancara difokuskan pada motivasi berdana, kepercayaan terhadap lembaga keagamaan, serta persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas dana.

Ketiga, analisis dokumentasi dilakukan terhadap materi kampanye penggalangan dana seperti brosur, pamflet, unggahan media sosial, hingga laporan keuangan atau dokumentasi publik lainnya. Teknik ini berguna untuk memahami bagaimana narasi dana dibentuk dan disampaikan kepada publik serta sejauh mana nilai-nilai Buddhis dikomunikasikan dalam aktivitas tersebut.

Teori Sosiologis sebagai Landasan Analisis

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data lapangan mencakup beberapa teori besar dalam sosiologi. Teori Pertukaran Sosial menekankan pada analisis relasi timbal balik antara penggalang dana dan donatur. Menurut Oxley (2020), individu cenderung berdana ketika mereka melihat adanya keuntungan sosial, seperti peningkatan reputasi atau keterikatan emosional dalam komunitas. Dalam konteks ini, penggalangan dana bukan hanya soal keikhlasan spiritual, melainkan juga berkaitan erat dengan ekspektasi sosial.

Selanjutnya, Teori Tindakan Sosial Max Weber memberikan kerangka kategorisasi terhadap motivasi umat dalam berdonasi, seperti tindakan nilai-rasional (misalnya berdana karena ajaran moral Buddhisme), tindakan afektif (didorong oleh empati), serta tindakan tradisional (dilakukan karena kebiasaan ritual). Tindakan donasi dipahami sebagai hasil dari struktur makna dalam sistem kepercayaan umat (Nole, 2024).

Kemudian, Teori Modal Sosial dari Pierre Bourdieu menyoroti pentingnya jaringan sosial dan kepercayaan dalam memperkuat efektivitas penggalangan dana. Dalam komunitas keagamaan, seperti dijelaskan oleh Berger (2006), jaringan sosial memungkinkan terciptanya

norma solidaritas dan kerja sama yang mendukung praktik filantropi. Ge et al. (2019) menambahkan bahwa reputasi dalam jaringan sosial menjadi bentuk modal yang dapat memperkuat posisi individu dalam komunitas.

Terakhir, Konsep Solidaritas Sosial dari Emile Durkheim menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dalam memperkuat kohesi sosial. Ritual keagamaan seperti doa bersama atau penggalangan dana massal menciptakan kesadaran kolektif yang memperkuat identitas komunal (Montemaggi, 2011). Dalam konteks ini, solidaritas yang terbentuk melalui praktik keagamaan menjadi kekuatan moral yang menopang ketahanan sosial komunitas (Eyigunlu, 2023).

Validitas dan Etika Penelitian

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi antar sumber data dan metode. Dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan mencerminkan realitas sosial yang sedang diteliti. Selain itu, aspek etika dijaga melalui *informed consent* dari partisipan, kerahasiaan identitas responden, dan penggunaan data semata-mata untuk tujuan akademik.

Metodologi ini dirancang untuk menangkap kompleksitas praktik penggalangan dana dalam komunitas Buddhis Kisaran yang berlandaskan pada nilai spiritual sekaligus menjawab tuntutan transparansi sosial. Dengan pendekatan sosiologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang interaksi antara agama, masyarakat, dan struktur sosial dalam konteks filantropi keagamaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik penggalangan dana dalam komunitas Buddhis di Kota Kisaran menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam. Melalui metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, peneliti mengidentifikasi berbagai bentuk metode penggalangan dana yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Buddha sekaligus merespons tantangan sosial modern.

Dalam konteks perkotaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, metode penggalangan dana Buddhis yang umum dipraktikkan meliputi kegiatan pengumpulan donasi pada hari besar keagamaan, acara kebajikan (*merit-making*), dan program sponsor komunitas. Kegiatan pengumpulan donasi sering dilakukan saat perayaan hari suci atau kalender lunar Buddhis, di mana umat berkumpul di vihara untuk memberikan sumbangan guna mendukung operasional vihara, kegiatan sosial, atau bantuan kemanusiaan (Kitiarsa, 2009). Acara *merit-making* seperti pemberian dana makanan kepada bhikkhu tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga

berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan donasi tunai secara kolektif (Higashida, 2023). Selain itu, keterlibatan pelaku usaha lokal dalam mendukung kegiatan keagamaan melalui program sponsor komunitas menunjukkan adanya tanggung jawab sosial yang tumbuh dalam jejaring bisnis lokal (Humaidi et al., 2022).

Dampak teknologi digital terhadap praktik penggalangan dana cukup signifikan. Media sosial telah menjadi alat penting dalam mempromosikan kampanye dana secara luas dan menjangkau audiens di luar batas komunitas lokal (Zhang, 2015). Penggunaan mobile banking dan sistem donasi daring mempermudah proses donasi, terutama bagi generasi muda di perkotaan yang lebih akrab dengan transaksi digital (Kazanskaia, 2025). Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan jumlah sumbangan tetapi juga memungkinkan interaksi *real-time* antara penggalang dana dan donatur melalui pembaruan kampanye, dokumentasi hasil, dan pelaporan penggunaan dana secara langsung. Teknologi digital telah merevolusi lanskap penggalangan dana Buddhis, menjadikannya lebih efisien, transparan, dan partisipatif.

Upaya filantropi Buddhis perlu menyeimbangkan antara tujuan spiritual dan akuntabilitas kelembagaan. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan praktik penggalangan dana yang etis dan sistem tata kelola yang transparan. Organisasi Buddhis dapat membentuk pedoman alokasi dana yang jelas agar sumbangan digunakan sesuai dengan nilai spiritual komunitas, seperti mendukung pendidikan, layanan kesehatan, atau program pengentasan kemiskinan (Nasir et al., 2023). Transparansi dan keterlibatan komunitas melalui pelaporan berkala dan forum diskusi publik akan memperkuat integritas spiritual lembaga, sekaligus memastikan efektivitas penggunaan dana (Garrison & Carroll, 2023).

Model dan kebijakan regulatif yang dapat memperkuat praktik penggalangan dana antara lain mencakup penggabungan antara regulasi mandiri dan pengawasan pemerintah. Salah satu model yang diusulkan adalah pembentukan komite audit independen di dalam organisasi untuk menilai praktik dan manajemen keuangan (Winzen, 2012). Di samping itu, penerapan kode etik sukarela dapat mendorong standar etis dan menunjukkan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik (Rosewarne et al., 2020). Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan berupa keharusan registrasi organisasi dan pelaporan berkala guna menjamin keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban (Stapenhurst & Pelizzo, 2012).

Manfaat sosial dari praktik penggalangan dana keagamaan sangat nyata. Kegiatan ini memperkuat ikatan antaranggota komunitas melalui partisipasi kolektif dalam berdonasi, menciptakan semangat solidaritas dan gotong royong (Arpannudin et al., 2021). Interaksi ini memperluas jejaring sosial yang dapat menjadi sumber dukungan saat terjadi krisis, sekaligus

meningkatkan ketahanan sosial komunitas (Hwang et al., 2019). Lebih jauh lagi, keterlibatan kolektif dalam aktivitas ini menumbuhkan budaya altruistik di mana kepentingan bersama didahulukan daripada kepentingan pribadi (Stroope, 2011). Dana yang terkumpul biasanya digunakan untuk inisiatif sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan, yang tidak hanya berdampak pada komunitas Buddhis tetapi juga masyarakat umum (Zulfathurrahmah et al., 2024).

Efektivitas penggalangan dana sangat bergantung pada tingkat transparansi lembaga pengelolanya. Ketika masyarakat mendeteksi adanya ketidakjelasan dalam pelaporan keuangan atau penyalahgunaan dana, kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan dapat menurun drastis. Hal ini berisiko mengurangi partisipasi donatur dan merusak kredibilitas organisasi (Syah, 2023). Oleh karena itu, pelaporan terbuka dan tata kelola yang bertanggung jawab merupakan prasyarat dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang mengedepankan keterbukaan dalam pelaporan keuangan cenderung lebih berhasil dalam mempertahankan loyalitas donatur serta kesinambungan kegiatan filantropi keagamaannya (Zulfathurrahmah et al., 2024) (Odak & Čehajić-Clancy, 2021).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik penggalangan dana dalam komunitas Buddhis di Kisaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi religius, tetapi juga sebagai sarana penguatan jaringan sosial, pembangunan etika kolektif, dan pemberdayaan masyarakat. Perpaduan antara semangat spiritual, keterlibatan sosial, serta tata kelola yang transparan menjadi fondasi utama dalam keberlanjutan filantropi keagamaan di era modern

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggalangan dana dalam komunitas Buddhis di Kota Kisaran tidak sekadar aktivitas keagamaan, tetapi juga praktik sosial yang memperkuat solidaritas komunitas, membangun kepercayaan, dan mendukung kesejahteraan bersama. Praktik-praktik seperti pemberian dana makanan, donasi rutin, penggunaan teknologi digital, hingga bazar amal mencerminkan aktualisasi nilai-nilai *dana* dan *karuna* dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan menunjukkan bahwa teknologi digital telah merevolusi cara penggalangan dana dilakukan, menjadikannya lebih efektif, partisipatif, dan transparan. Namun, tantangan seperti rendahnya pemahaman umat terhadap akuntabilitas dana dan potensi penyalahgunaan masih perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola dana yang akuntabel melalui

audit internal, pelaporan terbuka, dan edukasi berkelanjutan kepada umat mengenai nilai-nilai berdana yang etis.

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara agama dan tindakan sosial dalam konteks Buddhisme Indonesia, khususnya di komunitas urban. Studi lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi praktik serupa di wilayah lain, atau membandingkan efektivitas strategi penggalangan dana antara komunitas Buddhis dan agama lain di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, M., Ashariana, & Nurkadarwati. (2022). The governments' use of social networking sites (SNS) to promote citizens' trust during the COVID-19: Perceived religious values as a moderator. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(4), 156–186. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1383>
- Arpanudin, I., Suryadi, K., Malihah, E., & Anggraeni, L. (2021). The sociocultural basis of Indonesian philanthropy: Keeping citizens willing to share amid a pandemic. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 345–350. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44155>
- Barman, E. (2017). The social bases of philanthropy. *Annual Review of Sociology*, 43(1), 271–290. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053524>
- Berger, I. E. (2006). The influence of religion on philanthropy in Canada. *Voluntas International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 17(2), 110–127. <https://doi.org/10.1007/s11266-006-9007-3>
- Brehm, J., & Rahn, W. M. (1997). Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital. *American Journal of Political Science*, 41(3), 999. <https://doi.org/10.2307/2111684>
- Burmansah, B., Andriyaningsih, A., Sutiyono, S., Saputri, V. A. M., Suryanadi, J., & Ardianto, H. (2025). Penguatan ketahanan nilai keagamaan, kebudayaan, dan spiritualitas melalui pabbajjā dan upasampadā. 1(2), 366–375. <https://doi.org/10.62567/jpi.v1i2.1213>
- Diez, L. (2018). Increasing legitimacy and donations: A call to apply institutional theory to nonprofit fundraising (pp. 99–103). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75990-6_6
- Esser, H. (2005). Affektuelles Handeln: Emotionen und das Modell der Frame-Selektion. *Research Papers in Economics*.
- Eyigunlu, M. (2023). Towards a sociology of moral giving: Social motivations and functions of acts of donation. *Sociology Lens*, 36(4), 429–442. <https://doi.org/10.1111/johs.12431>
- Garrison, N. A., & Carroll, S. R. (2023). Genetic research with Indigenous peoples: Perspectives on governance and oversight in the US. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 8. <https://doi.org/10.3389/frma.2023.1286948>
- Ge, E., Chen, Y., Wu, J.-J., & Mace, R. (2019). Large-scale cooperation driven by reputation, not fear of divine punishment. *Royal Society Open Science*, 6(8), 190991. <https://doi.org/10.1098/rsos.190991>

- Herzog, P. S. (2020). The consequences of generosity: From the interpersonal to the collective (pp. 93–108). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26500-7_4
- Higashida, M. (2023). Process of constructing alternative social work discourses in Asia: A case study of Buddhist social work as social representations. *Asian Social Work and Policy Review*, 18(1). <https://doi.org/10.1111/aswp.12298>
- Holzkamp, K. (1992). On doing psychology critically. *Theory & Psychology*, 2(2), 193–204. <https://doi.org/10.1177/0959354392022007>
- Humaidi, H., Umar, U., Abdullah, M. R., & Khaerunnisa, K. (2022). Comparative study of zakat funds collection through manual fundraising and digital fundraising in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 347. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4601>
- Hwang, W., Yoon, J., Silverstein, M., & Brown, M. (2019). Intergenerational affectual solidarity in biological and step relations: The moderating role of religious similarity. *Family Relations*, 68(5), 549–564. <https://doi.org/10.1111/fare.12397>
- James, T. L., Shen, W., Townsend, D. M., Junkunc, M., & Wallace, L. G. (2021). Love cannot buy you money: Resource exchange on reward-based crowdfunding platforms. *Information Systems Journal*, 31(4), 579–609. <https://doi.org/10.1111/ISJ.12321>
- Kazanskaia, A. N. (2025). International fundraising as a strategic imperative for nonprofit organizations. *Neya-GJNPS*. <https://doi.org/10.64357/neya-gjnps-intfundraising>
- Kitiarsa, P. (2009). Beyond the Weberian trails: An essay on the anthropology of Southeast Asian Buddhism. *Religion Compass*, 3(2), 200–224. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2009.00135.x>
- Liu, A. Q., & Besser, T. L. (2003). Social capital and participation in community improvement activities by elderly residents in small towns and rural communities. *Rural Sociology*, 68(3), 343–365. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00141.x>
- Montemaggi, F. (2011). The enchanting dream of “spiritual capital.” *Implicit Religion*, 14(1), 67–86. <https://doi.org/10.1558/imre.v14i1.67>
- Nasir, N., Molyneux, S., Were, F., Aderoba, A. K., & Fuller, S. (2023). Medical device regulation and oversight in African countries: A scoping review of literature and development of a conceptual framework. *BMJ Global Health*, 8(8), e012308. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012308>
- Nole, O. A. (2024). Balinese actions and solidarity regarding Ogoh-Ogoh in Banjar Untal-Untal: A sociology of religion perspective. *Vidyottama Sanatana International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 8(1), 116–124. <https://doi.org/10.25078/vidyottama.v8i1.3584>
- Odak, S., & Čehajić-Clancy, S. (2021). Religion and politics as a dangerous mix: Effects of religiosity on intergroup forgiveness and reconciliation in a post-conflict setting. *Peace and Conflict Journal of Peace Psychology*, 27(3), 497–507. <https://doi.org/10.1037/pac0000554>
- Osuna, R. (2025). Public perception and trust in U.S. religious institutions post-abuse scandals: Implications for prevention and the recovery of credibility. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX(VIII), 1919–1924. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.908000157>

- Oxley, J. (2020). Examining donor preference for charity religious affiliation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3513203>
- Realo, A., Allik, J., & Greenfield, B. L. (2008). Radius of trust. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 39(4), 447–462. <https://doi.org/10.1177/0022022108318096>
- Rosewarne, E., Hoek, A. C., Sacks, G., Wolfenden, L., Wu, J., Reimers, J., Corben, K., Moore, M., Mhurchú, C. N., & Webster, J. (2020). A comprehensive overview and qualitative analysis of government-led nutrition policies in Australian institutions. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09160-z>
- Shen, V. (2018). The ethics of generosity in Chinese Mahayana Buddhism: Theory and practice (pp. 45–67). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2939-3_3
- Stapenhurst, R., & Pelizzo, R. (2012). Improving democracy and accountability in Ghana: The importance of parliamentary oversight tools. *Governance*, 25(2), 335–346. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01573.x>
- Stroope, S. (2011). Social networks and religion: The role of congregational social embeddedness in religious belief and practice. *Sociology of Religion*, 73(3), 273–298. <https://doi.org/10.1093/socrel/srr052>
- Syah, I. (2023). Social solidarity of Javanese society in seven villages of Modayag District. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 131–138. <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.688>
- Umarji, O., Wasif, R., Siddiqui, S., & Noor, Z. (2025). Philanthropy under uncertainty: Muslim religious giving during the COVID-19 pandemic. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 10(3). <https://doi.org/10.20899/jpna.c7vvvv81>
- Varey, R. J. (2015). Social exchange (theory). 1–3. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.WEOM090245>
- Winzen, T. (2012). European integration and national parliamentary oversight institutions. *European Union Politics*, 14(2), 297–323. <https://doi.org/10.1177/1465116512467088>
- Zhang, F. (2015). Remaking ancient virtues for the virtual world. *International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies*, 5(1), 41–54. <https://doi.org/10.4018/ijicst.2015010104>
- Zulfathurrahmah, Z., Baehaqi, A., & Prabowo, T. J. W. (2024). Accountability of Islamic non-governmental organizations in Indonesia: A netnographic study. *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 7(1), 68–82. <https://doi.org/10.18196/jati.v7i1.21596>